

Artikel

KEPENGARANGAN DAN PENERBITAN BUKU (II)

Oleh
Lasa Hs.*

4). Pemasungan kreativitas.

Pihak penguasa kadang tidak memberikan kebebasan kreativitas untuk berkarya apalagi mendorong. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan status quo politik penguasa pada periode tertentu terutama pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pemasungan kreativitas yang berupa sensor buku sering jauh diterapkan demi kepentingan politik. Peraturan sensor digunakan untuk menghindari penerbitan yang berupa kritikan langsung kepada Pemerintah saat itu terutama pemikiran-pemikiran yang diidentifikasi sebagai paham kiri karena isi maupun afiliasi politik penulisnya. Sensor Pemerintah terhadap buku sering tidak jelas arahnya apabila dibandingkan dengan sensornya terhadap media lain.

Menurut catatan pada tahun 1996 diperkirakan terdapat

sekitar 2.000 judul buku yang dilarang terbit sejak tahun 1965 (Krisnha Sen, 2001 : 19). Pada tanggal 30 November 1965 yakni dua bulan setelah peristiwa G 30 S yang menaikkan Soeharto sebagai penguasa saat itu, terdapat sekitar 70 judul buku dilarang beredar di lembaga-lembaga pendidikan nasional. Pelarangan edar buku ini terus berlangsung demi kepentingan segelintir manusia dan jika dihitung pada tahun 1980an rata-rata terdapat 14 buku yang dilarang terbit tiap tahunnya.

Sebenarnya buku dilarang beredar apabila dianggap mengganggu ketentraman masyarakat misalnya buku-buku porno, buku-buku seks, atau buku yang menyangkut SARA. Namun demikian alasan politiklah yang paling luwes untuk pelarangan buku-buku tertentu. Menurut pengalaman sejarah penyensoran karya selama ini bahwa sesuatu itu

Artikel

dilarang terbit apabila dianggap;

- a). Melawan ideologi Pancasila, UUD 45, dan GBHN;
- b). Menyebarkan Marksisme-Leninisme-Komunisme;
- c). Mengancam stabilitas dan persatuan nasional;
- d). Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional;
- e). Menyebarkan hal-hal yang dinilai cabul atau gambar-gambar porno;
- f). Antiagama atau menekan kehidupan agama-agama resmi di Indonesia
- g). Mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional;
- h). Mungkin memperburuk ketegangan antar suku, agama, ras, dan kelompok sosial.

3. Penerbitan Buku

Mendirikan dan mengelola penerbitan buku memerlukan modal, keahlian, dan manajemen yang belum tentu dapat dipenuhi oleh tiap orang. Ketika muncul pemikiran untuk mendirikan suatu penerbitan tentunya telah dipikirkan tentang prospek perbukuan, kompetisi, daya beli, dan kelangsungan hidup penerbit itu sendiri.

Selama ini peta penerbitan buku di Indonesia masih didominasi di Pulau Jawa khususnya di Kota Jakarta terdapat 124 penerbit, Bandung terdapat 32 penerbit, Yogyakarta terdapat 22 penerbit, Semarang terdapat 13 penerbit, Solo terdapat 8 penerbit, dan di Surabaya terdapat 30 penerbit (Balairung, 2001 : 74). Menurut data IKAPI pada awal 1990 an setengah dari penerbit Indonesia ada di Jakarta, 40% di Jawa, kurang dari 6% di Sumatera dan 0,5% di Bali dan kurang dari 1% di Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

Kondisi semacam ini berakibat kurang meratanya penyebaran buku ke seluruh wilayah Indonesia. Apalagi biaya pengiriman ke luar Jawa terhitung mahal. Hal ini disebabkan bahwa populasi penduduk Indonesia memang lebih dari separuh tinggal di Pulau Jawa.

Munculnya penerbit belum dilandasi dengan idealisme sebagai penerbit yang profesional, akan tetapi ada pula penerbit lahir yang bermula dari Yayasan pendidikan yang berlabel keagamaan atau dengan

adanya tuntutan penerbitan suatu perguruan tinggi. Penerbit Kanisius misalnya, ia lahir pada tahun 1922 merupakan pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Pendidikan Guru/SPG rintisan Pater Van Lith pada tahun 1908. Untuk memenuhi kebutuhan pengajarannya, Kanisius mencetak buku-buku sendiri. Hal ini juga terjadi pada Muhammadiyah yang memiliki percetakan pada tahun 1915. Keduanya tidak lepas dari misi dakwah yang diemban. Namun demikian ada pula penerbit yang sejak awal memiliki idealisme sebagai penerbit profesional seperti Gramedia, Rosdakarya, dan lainnya.

Apapun latar belakang kelahiran penerbitan, penerbit tetap memiliki komitmen untuk melakukan *transfer knowledge* dan *transver values*. Transfer *knowledge* sangat terkait dengan proses pendistribusian pengetahuan. Dengan adanya proses ini, ilmu pengetahuan yang diterima manusia diharapkan mampu mengendap di relung-relung pikiran manusia dan berperan sebagai pemandu setiap tindakan mereka. Sedangkan dalam *transfer of*

values lebih dititikberatkan pada penyebaran nilai-nilai kehidupan pada manusia. Dengan adanya pemahaman nilai-nilai ini, diharapkan manusia tetap bertindak dan berperilaku dalam koridor humanisme sebab dalam gesekan-gesekan kepentingan kadang orang melupakan bahkan sengaja membuang kemanusiaan dari diri mereka. Kemudian terjadilah pemerkoasaan, kesadisan, dan kengerian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari akhir-akhir ini.

Dehumanisasi ini penting ditanamkan terutama pada masyarakat yang dalam setting kehidupannya yang mengarah pada sikap individualistik dan kapitalistik. Yakni masyarakat yang mementingkan kebutuhan diri sendiri tanpa mengindahkan kesengsaraan orang lain.

Kehidupan kapitalistik cenderung pada komersialisasi yang tinggi dengan ciri-ciri:

- a. Adanya pembagian kerja sedemikian rupa dalam masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan spesialisasi;
- b. Adanya kerangka kerja hukum mengenai kepemilikan pribadi dan kontrol;

Artikel

- c. Adanya kecenderungan individual untuk bertindak demi kepentingan diri sendiri (M. Adhi Ikhsanto, 2001 : 55).

Problematika Penerbitan Buku

Di era teknologi informasi dan kompetitif ini, penerbitan buku di Indonesia menghadapi beberapa problem yakni; maraknya buku digital, rendahnya kemampuan menulis, pembrendelan, rendah minat baca masyarakat, dan persaingan antar penerbit.

a. Buku Digital

Munculnya buku digital cepat atau lambat akan mempengaruhi perkembangan bahkan ancaman penerbitan buku konvensional. Selama ini dapat dikatakan betapa susahny seorang pengarang harus menata huruf demi huruf dengan ketelitian untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Namun dengan bergeraknya jaman dan bergantinya era, maka dunia perbukuan seperti itu lama kelamaan akan ditinggalkan orang. Sebab dunia cyber telah melakukan berbagai keseder-

hanaan bahkan mungkin dapat dikatakan drastis.

Buku digital hadir dalam bentuk CD yang tersusun urutan tertentu. Buku jenis ini dikemas dalam bentuk paket informasi magnetik yang dapat ditransfer secara digital ke dalam komputer. Oleh karena itu buku ini dapat dibaca, diolah, dan dikirimkan ke komputer lain melalui kabel atau gelombang radio. Untuk membuka halaman satu ke halaman lain cukup menekan salah satu tut keyboard atau menggerakkan panel/*select* dan meng"*klik*" penghubung/*link* yang terdapat di layar monitor.

Adapun buku konvensional tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Buku konvensional ini tidak dipindahkan ke tempat yang sangat jauh dalam waktu yang singkat. Materinya yang berupa kertas itu untuk mentransfernya memerlukan waktu lama, belum lagi adanya penyensoran.

Perkembangan buku digital sangat menjanjikan dan menarik peminat karena perangkat ini mampu melakukan proses transfer dari dunia nyata ke dunia maya. Citra yang dipindah ke dunia maya ini

hanya berubah bentuk yang biasanya disebut dengan konversi analog ke digital. Proses seperti ini terus menerus mengalami penyempurnaan agar lebih riil.

Melalui buku digital ini, seseorang dapat melakukan akses langsung untuk menemukan buku tertentu. Disana dapat dilihat foto dan dapat dibaca biografi seseorang lengkap dengan karyanya yang juga langsung dapat dibaca. Disamping itu juga dapat dilakukan tanya jawab secara interaktif yang jawabannya dapat diacu pada buku-buku tertentu tanpa harus melakukan macam-macam interpretasi.

b. Pembrendelan

Sebenarnya kebebasan berpendapat telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 yang disebutkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran itu dijamin baik secara lisan maupun tertulis. Demikian pula dalam Ketetapan MPR No. : XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang mencantumkan Piagam Hak Asasi Manusia. Disana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menya-

takan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 14). Namun demikian dalam realita kebebasan berpendapat dan berinformasi ini telah terkebiri. Penyensoran buku di Indonesia justru setelah buku itu terbit.

Sejarah penyensoran pernah terjadi pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh yang menentang ajaran Hamzah Fansuri. Di Pulau Jawa pernah juga terjadi pelarangan terhadap ajaran-ajaran Syech Siti Jenar atau Lemah Abang karena dianggap membahayakan.

Pada jaman Belanda dikeluarkan peraturan untuk menyerahkan contoh cetakan kepada penguasa untuk diteliti sebelum dicetak keseluruhan. Kemudian pada jaman Jepang ada peraturan bahwa semua buku yang ditulis dalam Bahasa Belanda saat itu dilarang terbit di Indonesia. Pada saat itu Badan Sensor Jepang (Hodokan) melakukan penyensoran pada buku-buku pelajaran, bacaan umum, naskah pengumuman, acara bioskop, apalagi naskah pidato. Meskipun ketat pengawasan Jepang ternyata masih ada juga surat kabar yang terbit di bawah

Artikel

tanah yakni Merah Putih di Surakarta.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan berpendapat terbelenggu dengan adanya pembredelan sejumlah surat kabar, majalah, maupun buku-buku yang dianggap mengganggu status quo. Buku-buku yang pernah dilarang pada rezim Soeharto itu antara lain : Saya Musuh Soeharto (1990) karya Sri Bintang Pamungkas, Politik Dasamuka Rezim Orde Baru (1998) karya Subadio Sastroutomo. Di samping itu terdapat buku-buku yang justru dicari orang menjelang dan pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan (21 Mei 1998) antara lain; Bre-X, Sebingkah Emas di Kaki Pelangi, Kronologi Penggulingan Soeharto (72 jam Menegangkan), Suara Amien Rais Suara Rakyat, Amien Rais Sang Demokrat, dan Melangkah Karena Dipaksa Sejarah.

Pembredelan dan penyensoran semula untuk menjaga stabilitas masyarakat, namun kenyataannya digunakan oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat kecil dan hal ini sebenarnya merupakan penghambatan arus informasi. Kea-

daan serupa memang terjadi di Uni Sovyet pada masa pemerintahan Stalin yang akhirnya mematikan kreativitas para ilmuwan dan sastrawan. Kondisi seperti itu juga pernah terjadi pada masa Nazisme Hitler dan Fasisme Jepang. Akibat adanya penindasan pendapat ini akan melemahkan daya cipta dan menghambat kreativitas bangsa.

Kebebasan dan kemerdekaan berpendapat merupakan hak tiap individu, namun dalam hal ini harus disertai tanggung jawab moral dan tetap mempertahankan nilai dan etika profesi. Kemerdekaan memang relatif dan tergantung bagaimana cara pandangnya. Orang yang ditahan maupun terpenjara belum tentu mereka itu tidak merasakan kemerdekaan. Sebaliknya mereka yang bebas kemana-mana belum tentu merasa merdeka secara kejiwaan. Sebagai contoh adalah Prof. Dr. HAMKA yang dijejlokkan ke penjara pada masa rezim Soekarno karena fitnahan PKI itu. Beliau justru mampu menyelesaikan penulisan Tafsir Al Azhar 30 juz itu dalam penjara.

Demikian pula halnya dengan Arswendo Atmowiloto yang sempat menulis beberapa novel di dalam penjara. Demikian pula nama-nama Muchtar Lubis, Bung Karno, Firdaus A.N., Pramudya Ananta Toer, Sayid Qutub yang justru melahirkan karya tulis ketika mereka itu hidup di balik tirai besi. Dengan demikian maka makna kebebasan itu tidak mesti bebas secara fisik. Sebab suatu realita bahwa tidak sedikit mereka yang bebas secara fisik tetapi jiwanya terpenjara.

c. Rendahnya Kemampuan Menulis

Rendahnya minat baca akan berdampak pada keengganan menulis. Kemudian juga berakibat rendahnya penerbitan buku. Para pengajar (dosen dan guru) ternyata tidak memiliki motivasi tinggi untuk menulis buku. Para dosen memang sering menulis makalah atau laporan penelitian. Namun untuk penulisan buku yang diterbitkan secara nasional, kiranya jumlah mereka masih dapat dihitung dengan jari. Misalnya saja yang terjadi di ITB yang memiliki 1.200 dosen ternyata yang mampu dan mau

menulis buku hanya sekitar 10 orang. Disamping itu apabila ditinjau dari pengadaan diktat, maka dari 2.320 mata kuliah ternyata hanya terdapat 154 diktat mata kuliah dan itu berarti 6,64% dari seluruh mata kuliah. Rendahnya penulisan buku oleh dosen ini juga terjadi di kampus UGM yakni dari sekitar 1.500 dosen ternyata Gadjah Mada University/GMUP hanya mampu menerbitkan 54 judul.

Para guru sekolahpun mengalami nasib yang sama (tidak mampu dan/atau tidak mau menulis) baik menulis karya-karya ilmiah. Oleh karena itu rata-rata guru hanya berhenti pada golongan/pangkat III/d. Sebab untuk naik golongan/pangkat ke IV/a harus membuat karya ilmiah (Kedaulatan Rakyat, (18-12-2002).

d. Rendahnya Minat Baca.

Tinggi rendahnya produksi buku dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat baca suatu masyarakat. Masyarakat Jepang yang dikenal minat bacanya tinggi ternyata setiap tahun mampu menerbitkan 100.000 judul, sedangkan Indonesia yang berpenduduk sekitar 220

Artikel

juta itu hanya mampu menerbitkan 5.000 judul setiap tahunnya. Kondisi semacam ini mempengaruhi maju mundurnya perkembangan perbukuan dan penerbitan di Indonesia.

Kondisi minat baca bangsa kita belum seperti yang diharapkan. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa bukti kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya saja, menurut penelitian yang dilakukan oleh *The International Association for Educational Achievement* pada tahun 1992 yang menempatkan Indonesia diperingkat 28 dari 32 negara yang diteliti. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa tercatat minat baca tertinggi adalah Finlandia, lalu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sampai peringkat sembilan. Hongkong dan Singapura masing-masing menduduki peringkat ke sepuluh dan ke sebelas (Republika, 9 Mei 1994).

Kondisi minat baca bangsa kita inipun menduduki papan bawah di kawasan Asia. Menurut Soetjipto (Kepala Biro Perencanaan DIKNAS) yang dikutip Umar Sidik (2002) menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke 38 dari

42 negara di Asia dalam hal kultur dan kebiasaan membaca.

Rendahnya minat baca ini akan berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan kita. Sebuah studi atau survei yang dilakukan oleh asosiasi penilaian pendidikan internasional menyebutkan bahwa prestasi matematika anak Indonesia untuk tingkat lanjutan tingkat pertama berada di nomor empat dari bawah dari 38 negara. Singapura di urutan teratas, Malaysia di urutan 14 dan Amerika Serikat di urutan 18.

Minat baca sangat erat dengan perbukuan, tradisi baca, dan perpustakaan. Kondisi perpustakaan di Indonesia belum seperti yang diharapkan misalnya saja dinyatakan bahwa hanya 5% dari sekitar 300.000 SD sampai SLTA di seluruh Indonesia yang memiliki perpustakaan (Kompas, 15 Mei 2002).

Bagaimanapun juga bahwa minat dan kebiasaan membaca suatu masyarakat mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap dunia penerbitan buku atau industri perbukuan dalam masyarakat yang bersangkutan (Alfons Taryadi, 1997 : 131). Oleh

karena itu adanya usaha peningkatan minat serta kebiasaan masyarakat Indonesia perlu didukung sepenuhnya oleh semua pihak.

e. Persaingan Antar Penerbit

Usaha penerbitan kecuali sebagai kegiatan intelektual juga merupakan kegiatan bisnis yang tidak dapat lepas dari persaingan. Persaingan ini kadang-kadang tidak lagi mengindahkan etika bisnis dan hak-hak permodalan. Maka penerbit kecil/lokal merasa tidak mampu menghadapi persaingan penerbit besar atau penerbit-penerbit pusat.

Bagi penerbit besar seperti Gramedia berani membeli dan berburu hak cipta ke Frankfurt Jerman dari penerbit-penerbit terkenal terutama penerbit-penerbit dari Amerika Serikat seperti Random House, Harper Collins, Pearson Group dan lainnya. Pembelian hak cipta ini cukup tinggi yakni di atas 50% dari buku-buku yang diterbitkan setiap tahunnya. Kondisi seperti ini dapat memukul kehidupan penerbit kecil/lokal. Sebaliknya bagi penerbit kecil juga tidak segan-segan melakukan pembajakan

buku-buku laris atau buku-buku sekolah.

Di samping itu, ternyata tidak sedikit penerbit-penerbit besar melakukan intervensi ke sekolah-sekolah yang berakibat membebani orang tua. Kemudian sekolah (guru dan kepala sekolah) terjebak pada aktivitas bisnis dan mengesampingkan tugas utamanya sebagai pengajar. Sedangkan murid-murid sekolah itu terpaksa membeli buku-buku yang ditawarkan atau dijual guru kepada mereka.

Sebagai akibat praktek tersebut adalah bahwa toko-toko buku, agen-agen buku, dan penerbit daerah tidak mampu bersaing dengan penerbit-penerbit dari Jakarta. Kemudian toko buku, agen, dan penerbit daerah bisa gulung tikar (Kompas, 25 September 2002). Gempuran-gempuran pemasaran dan produksi buku ini juga dirasakan oleh penerbit-penerbit perguruan tinggi. Penerbit buku perguruan tinggi di Sumatera Utara seperti Pustaka Widya Sarana kini kondisinya hidup segan mati tak mau. Sebab penerbit yang didirikan pada tahun 1992 itu dulu mampu menerbitkan rata-

Artikel

rata 37 judul buku/tahun dan pada tahun terakhir ini hanya mampu menerbitkan 1 judul buku baru. Demikian pula Gadjah Mada University Press Yogyakarta kondisinya sekarang juga sulit berkembang, dan untuk mempertahankan hidupnya kini banyak melakukan cetak ulang buku-buku yang laris.

f. Penutup

Kehadiran pengarang dan penerbit buku dalam kehidupan bangsa yang sedang berkembang ini diharapkan mampu mendorong kemajuan intelektual masyarakat. Sebab kemajuan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan buku baik kuantitas maupun kualitasnya. Semakin tinggi kemajuan peradaban dan intelektual suatu bangsa maka semakin tinggi pula kebutuhan dan produktivitas buku suatu negara.

Perkembangan kepengarangan dan penerbitan buku di Indonesia mengalami pasang surut dan akhir-akhir ini mengalami kelesuan. Banyak faktor yang menyebabkan kelesuan ini antara lain adalah rendahnya minat baca, muncul-

nya buku digital, pelecehan hak-hak intelektual, kurang penghargaan kepada pengarang, persaingan antar penerbit, dan maraknya pembajakan buku. Apabila problema ini tidak diantisipasi, maka kondisi perbukuan di negeri ini akan mengalami penurunan terus menerus.

Oleh karena itu perlu usaha peningkatan minat baca, pengurangan pajak-pajak yang berkaitan dengan kepengarangan, perbukuan, penerbitan pelanggaran hak-hak cipta, dan perlunya sinergi antar penerbit lokal dan pusat maupun dengan penerbit-penerbit luar negeri.

DAFTAR REFERENSI

- Dhakidae, Daniel, 1997. *Ekonomi Politik Industri Buku di Indonesia dalam "Buku Membangun Kualitas Bangsa"*. Yogyakarta : Kanisius.
- Ikhanto, M. Ardhi. 2001. *Industri Buku; Antara Pilihan Humanisme dan Determinisme*. *Balaiung*, XV (34) 2001: 54 – 55.
- Kedaulatan Rakyat*, 5 Oktober 2002 dan 18 Oktober 2002.
- Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Hak Azasi Manusia*. Jakarta : MPR

Khuri, Buldanul. Terjemahan; Proyek Pembodohan Masal. *Balairung*, XVI (34) 2001

Kompas, 24 September 2002

Lasa Hs. Demokratisasi Informasi, *Buletin Perpustakaan* (36) Desember 2000

-----, 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Republika, 9 Mei 1994

Sen, Krishna dan David T. Hill. Perbukuan Indonesia; Translasi dan Transgresi. *Balairung*, XVI (34) 2001

Stein, M.C. 1977. *How to Write Better Composition*; Term Paper. New York: Comestone

Taryadi, Alfons. 1997. *Buku Membangun Kualitas Bangsa*. Yogyakarta : Kanisius

The Liang Gie. *Dunia Karang Mengarang*. Yogyakarta : Lembaga Kepengarangan

Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.

* Pustakawan UGM dan Dosen D3 Fak. Adab IAIN SUKA, D3 Perpustakaan FISIPOL, D3 Agroindustri FTP UGM, dan S. Institut Pertanian Yogyakarta